



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 13 Juni 2014

Halaman: 4

## Kampanye Jangan Sampai Rusak Fasum

**YOGYA (MERAPI)** - Tulisan dukungan terhadap salah satu calon presiden Pemilu 2014 kembali marak di Kota Yogyakarta. Bahkan sampai mengganggu fungsi fasilitas umum yakni ruang tunggu sepeda di simpang jalan.

Salah satunya di pertigaan Jalan Pramuka arah Tegalgendu Kotagede. Berdasarkan pantauan *Merapi*, Kamis (12/6) kotak hijau ruang tunggu sepeda di sisi timur sudah ditulisi dukungan salah satu capres dengan cat putih.

Kasi Rekayasa Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Windarto mengatakan menyerahkan pemindahan itu kepada instansi yang berwenang. Dishub Kota Yogyakarta sudah menyampaikan surat resmi ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berkaitan dengan larangan pemasangan alat peraga kampanye pada sarana dan prasarana lalu lintas.

"Larangan pemasangan APK pada sarana prasarana lalu lintas karena akan menurunkan fungsinya. Kami tidak bisa menindak misalnya menghapusnya karena itu sensitif. Apalagi pada masa-masa seperti ini," paparnya, kemarin.

Menanggapi hal Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti meminta pemasangan alat peraga kampanye harus mengikuti aturan yang ada. Termasuk jangan sampai merusak fasilitas publik. Perwal pemasangan APK sudah ia tandai, sehingga pelanggaran dapat segera ditertibkan bersama.

Sementara itu Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta Agus Triyatno menjelaskan tulisan di sarana lalu lintas atau fasilitas publik lainnya termasuk pelanggaran pemasangan APK. Penertiban harus dilakukan bersama dengan Panwaslu, KPU, Dinas Ketertiban dan Kepolisian sesuai Perwal pemasangan APK.

"Harus ditertibkan. Tim pemenangan dari calon atau partai yang bersangkutan juga harus mengceat untuk menutup tulisan itu. Jika tidak, tim akan melakukan penertiban bersama," terangnya Agus.

Panwaslu Kota Yogyakarta kini juga sudah menyiapkan sedikitnya 100 pelanggaran pemasangan APK pilpres. Rekomendasi pelanggaran itu baru akan dilayangkan setelah ada tembusan pengesahan perwal dari Pemkot.

Dari Sleman dilaporkan, Ketua KPU setempat, Ahmad Shidqi memaklumi kekecewaan sejumlah anggota KPPS yang tidak diperpanjang masa tugasnya pada pilpres mendatang. Akan tetapi pihaknya berpatokan pada peraturan yang ada saat ini.

"Regulasinya yang menetapkan pusat. Karena pada pilpres kan ada perbedaan pemilih dan pengurangan TPS. Jumlah pemilih tiap TPS juga ditambah jadi 800 orang untuk efisiensi. Jadi sebenarnya tidak perlu kecewa," ucap Ahmad Shidqi.

Dengan ketentuan tersebut maka akan ada penggabungan sejumlah TPS. Konsekuensinya, sejumlah TPS akan hilang. Hal ini yang membuat beberapa anggota KPPS sempat menyatakan kekecewaan.

"Ada yang bilang saat susah seperti pileg dipakai, tapi ketika kerjanya lebih mudah seperti pilpres malah tidak dipakai. Saya kira wajar, tapi itu kan sudah jadi peraturan," imbuhnya.

Pengurangan jumlah TPS di wilayah Sleman sendiri ada 16 TPS. Terdiri dari 8 TPS di wilayah Kecamatan Gamping dan jumlah yang sama di Kecamatan Depok. Namun untuk TPS di rumah sakit bertambah 1 yang ditempatkan di RS JIH Sleman Yogyakarta. (Tri/Feb)-a

Tindak Lanjut

1. .... ] Untuk Ditanggapi

2. .... ] Untuk Diketahui

3. .... ] Jumpa Pers

4. ....

5. ....

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 29 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005